

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas, Makassar.

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dendi Sugono, dan Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

Edmon Makarim, 2018, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Edisi Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

G.H.S Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, cetakan keempat Jakarta.

Habib Adjie, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, penerbit : PT Refika Aditama, Bandung, Cet kedua.

———, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, penerbit Refika Aditama, Cetakan Kesatu, Bandung.

- , 2013, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, penerbit Refika Aditama, cetakan ketiga, Bandung.
- , 2017, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, penerbit Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Penerbit Dunia Cerdas, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu PerUndang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Ira Koesoemawati, 2009, Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Penerbit Raih Asa Sukses, Cetakan pertama, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Komar andasasmita, 1991, *Notaris I*, Sumur, Bandung.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1990, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Binacipta, Bandung.

Pengurus pusat ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 Tahun Ikatan Notaris Di Indonesia: Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Yang Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press.

Ridwan HR. 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, 2017, *Penerapan Penelitian Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.

Than Thong Kie, 2011, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. penerbit : PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, Cet. Kedua.

B. Tesis/Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Uud 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 4.

Henny Saida Flora, 2021, *Fungsi Akta Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum, Universitas Katolik

Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, *Justiqa: jurnal hukum*, Vol. 03 no. 02.

Muhammad Ricky Ilham Chalid, 2020, Tesis, *Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0*, Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Reza Azis, 2021, Tesis, *Keabsahan Surrogat Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam akta Notaris*. Program studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hassanuddin Makassar, tahun.

Wahyu Simon Tampubolon, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, STIH Labuhanbatu, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 04. No. 01.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia s.1860, mb. 1 juli 1860.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



NOTARIS
ANDI SENGNGENG PULAWENG SALAHUDDIN, SH. M.Kn.
SK MENKEH RI NO.C-303.HT.03.01-Th 2005 Tanggal 29 Juli 2005
Jalan Lamadukelleng Nomor 82, Kota Makassar.
Telp/Fax. (0411) 833804.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 138/NOT/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANDI SENGNGENG PULAWENG SALAHUDDIN, SH,M.Kn**
Jabatan : Notaris/ PPAT
Alamat : Jalan Lamadukelleng No. 82

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : **BAGUS TRI HARTONO**
No. Mahasiswa : B022201018
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Universitas : **Universitas Hasanuddin**

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Notaris Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, SH, M.Kn di Jalan Lamadukelleng No 82 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI"**

demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperti halnya.

Makassar, 08 Agustus 2022

Notaris/ PPAT



Andi Sengngeng Pulaweng Salahuddin, SH,M.Kn

BRILLIAN THIORIS, SH
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KOTA MAKASSAR

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-634.HT.03.01-Th.1999 Tanggal 21 Maret 1999
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 27-XI-1999 Tanggal 19 Juli 1999
Jl. Adhyaksa Baru Komplek Ruko Jasper II No.46 F (Depan PTC) Panakkukang Mas
Telp. (0411) 447815, Fax. (0411) 455986 Kota Makassar

Makassar, 21 Juli 2022

Nomor : 04/N/VII/2022

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BRILLIAN THIORIS, SH**
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Adhyaksa Baru Ruko Jasper II No. 46 F,
Panakkukang Mas, Makassar

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : **BAGUS TRI HARTONO**
No. Pokok : B022201018
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN
SIDIK JARI**

benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris di Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Kota Makassar

KANTOR NOTARIS
BRILLIAN THIORIS, SH
Jl. Adhyaksa Baru, Komplek Ruko Jasper II
No. 46 F (depan Swiss-bellin Hotel)
HP/WA: 083 939 759 122
KOTA MAKASSAR
BRILLIAN THIORIS, SH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : BAGUS TRI HARTONO

NIM : B022201018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan penelitian pada salah satu Kantor Notaris Wilayah Kota Makassar dan telah sesuai berdasarkan surat dari Pengurus Daerah kota Makassar Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan nomor surat 734/K/06.VII/PD-MKS/2022, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21/07/2022



NOTARIS & PPAT
Dr. MUSTAHAR, S.H., M.Kn.
Bumi Tamalanrea Permai Ruko Blok M No.1
Telp./Fax. (0411) 590093, 4774055 Makassar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

8 Juli 2022

SURAT KETERANGAN
Nomor : W23 - UM.01.01-645

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Bagus Tri Hartono**
NIM : B02221018
Program Studi : Magister Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b Kepala Bagian Umum,



Basir, SH., MH.
NIP. 197211111993031001

LIEKE TUNGGAL, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia tgl. 26 Nopember 1998 No. C - 619. HT. 03.01 - Th. 1998
Jl. A. Mappanyukki No. 24, Kota Makassar 90125
Telp. (+62411) 87 88 89, Fax. (+62411) 87 88 80

Makassar, 20 Juli 2022
Nomor : 86/N/VII/2022

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIEKE TUNGGAL, SH**
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Andi Mappanyukki No. 24, Makassar

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : **BAGUS TRI HARTONO**
No. Pokok : B02221018
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN
SIDIK JARI**

benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris di Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Makassar



LIEKE TUNGGAL, SH

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : BAGUS TRI HARTONO

NIM : B022201018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan penelitian pada salah satu Kantor Notaris Wilayah Kota Makassar dan telah sesuai berdasarkan surat dari Pengurus Daerah kota Makassar Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan nomor surat 734/K/06.VII/PD-MKS/2022, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20/09/2022



Bagus Redman



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 19 Juli 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 89 /PB.01/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Bagus Tri Hartono.**
Nomor Pokok : B02221018
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Notaris
Pada Pembuatan Akta Autentik Tanpa
Tanda Tangan Dan Sidik Jari.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 18 Juli 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 24 Juni 2022 Nomor : 5028/UN4.5.1/PT.01.04/2022.



WAKIL KETUA

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.
NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

SEPDIANA JAURY PALA'LANGAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Jl. Toddopuli 2 No. 24

Makassar 90231

Hp. 0811445065/082292444887

SURAT KETERANGAN

NO. 15/N/VII/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SEPDIANA JAURY PALA'LANGAN, S.H., M.Kn.

Jabatan : Notaris/PPAT

Alamat : Jalan Toddopuli 2 Nomor 24

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : BAGUS TRI HARTONO

No. Pokok : B022201018

Program : Magister (S2) Kenotariatan

Universitas : Universitas Hasanuddin

Telah melakukan penelitian di Kantor Sepdiana Jaury Pala'langan, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jalan Toddopuli 2 Nomor 24 untuk melakukan wawancara dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI**".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Juli 2022



SEPDIANA JAURY PALA'LANGAN, S.H., M.Kn.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : BAGUS TRI HARTONO

NIM : B022201018

Program Studi : Magister Kenotariatan

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Benar telah melakukan penelitian pada salah satu Kantor Notaris Wilayah Kota Makassar dan telah sesuai berdasarkan surat dari Pengurus Daerah kota Makassar Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan nomor surat 734/K/06.VII/PD-MKS/2022, dalam rangka penulisan Tesis dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PADA PEMBUATAN AKTA
AUTENTIK TANPA TANDA TANGAN DAN SIDIK JARI”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 21 / 7 / 2022


STEVEN WINARSO, S.H., M.Kn
NOTARIS / PPAT
JL. BULUSALAKA No. 32 A
0411 - 3830341
MAKASSAR - 08144



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 1715/UN4.5.1/TD.06/2022

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING TESIS BAGI MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat usulan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Tanggal 16 Februari 2022 perihal Usulan Pembimbing Tesis dan Rencana Judul Tesis bagi Sdr. BAGUS TRI HARTONO Nomor Induk B022201018.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Tesis bagi Sdr. BAGUS TRI HARTONO Nomor Induk B022201018, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unhas, dipandang perlu mengangkat Ketua Komisi Penasihat dan Anggota Komisi Penasihat Tesis.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin No. 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 8/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 13/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 36620/UN4.1/PP.39/2017 tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2825/UN.1/KEP/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode II tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping bagi Sdr. BAGUS TRI HARTONO Nomor Induk B022201018, Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unhas dengan susunan sebagai berikut :
1. **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. (Ketua)**
2. **Dr. Muhammad Aswan, SH.,M.Kn (Anggota)**
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Hukum Unhas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 16 Februari 2022


Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi
Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Dekan FH-UH sebagai Laporan;
2. Para Wakil Dekan FH-Unhas;
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH-UNHAS;
4. Sdr. Bagus Tri Hartono;
5. Arsip.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 1716/UN4.5.1/TD.06/2022

Tentang
**PENGANGKATAN PANITIA PENILAI SEMINAR USUL, HASIL, DAN UJIAN AKHIR MAGISTER
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat usulan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Tanggal 16 Februari 2022 perihal Usulan Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. BAGUS TRI HARTONO Nomor Induk B022201018.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Seminar Usul, Hasil dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. BAGUS TRI HARTONO Nomor Induk B022201018, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unhas, dipandang perlu mengangkat Panitia Penilai.
b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin No. 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 8/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 13/UN4.1/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 36620/UN4.1/PP.39/2017 tentang Pembimbing tugas akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2825/UN.1/KEP/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode II tahun 2018-2022.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
PERTAMA : Mengangkat Panitia Penilai Seminar Usul, Hasil, dan Ujian Akhir Magister bagi Sdr. BAGUS TRI HARTONO Nomor Induk B022201018, Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unhas dengan susunan sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. sebagai Ketua
2. Dr. Muhammad Aswan, SH.,M.Kn sebagai Sekretaris
3. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM sebagai Anggota
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P. sebagai Anggota
5. Tjhin Jefri Tanwil, S.H.,M.Kn. sebagai Anggota
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Hukum Unhas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 16 Februari 2022

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



Tembusan :

1. Dekan FH-UH sebagai Laporan;
2. Para Wakil Dekan FH-UNHAS;
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan FH-UNHAS;
4. Sdr. Bagus Tri Hartono;
5. Arsip.

